

# Historical Literacy Training for Social Studies Teachers in Banyuwangi to Improve the Quality of History Learning Based on the Pancasila Student Profile

Andika Ronggo Gumuruh<sup>1</sup>, Mohammad Sa'id Al Farisi<sup>2</sup>

PGRI University Banyuwangi

[andikaronggo@gmail.com](mailto:andikaronggo@gmail.com)

## Abstract

*The low historical literacy of Indonesian students is a concerning objective condition. This condition not only impacts academic grades but is even more dangerous for the formation of national identity and national resilience in the face of the flow of information. Therefore, intervention through teacher training as the spearhead of learning is a crucial and urgent strategy. Teachers need to be equipped with the understanding and skills to transform history learning from memorization to critical-historical thinking. The Participatory Action Research (PAR) approach in this training is implemented by involving teachers as active partners throughout the entire cycle of activities, from identifying problems to evaluating results. PAR was chosen because it aligns with the characteristics of history learning problems that require contextual and sustainable solutions. The results of the mentoring in this historical literacy training program provide a relevant empirical basis for discussion within the theoretical framework of history education and the implementation of the Pancasila Student Profile. The finding that 85% of participants successfully developed innovative teaching tools confirms Vygotsky's (1978) constructivist learning theory on the importance of scaffolding in professional teacher development. The process of tiered and continuous mentoring has proven effective in building teachers' Zone of Proximal Development, where teachers are able to achieve a higher level of understanding through systematic guidance.*

**Keyword:** MGMP IPS, Historical Literacy Training for Social Studies Teachers, Participatory Action Research (PAR)

## Pendahuluan

Literasi historis bukan sekadar kemampuan mengingat nama, tanggal, dan peristiwa sejarah (sejarah sebagai produk). Lebih dari itu, literasi historis adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan merefleksikan masa lalu sebagai suatu proses yang kompleks (sejarah sebagai proses). Menurut Seixas & Morton (2013), literasi historis mencakup beberapa kompetensi kunci, yaitu:

1. Konsep Bukti Sejarah (Historical Evidence): Kemampuan menggunakan sumber primer dan sekunder untuk membangun pemahaman.
2. Kausalitas dan Hubungan (Cause and Consequence): Menganalisis sebab-akibat yang multidimensi dari suatu peristiwa.
3. Perspektif Historis (Historical Perspectives): Memahami sudut pandang orang-orang di masa lalu dalam konteks nilai dan kepercayaan mereka.
4. Signifikansi Historis (Historical Significance): Kemampuan menilai mengapa suatu peristiwa atau tokoh dianggap penting.
5. Kontinuitas dan Perubahan (Continuity and Change): Mengidentifikasi apa yang berubah dan apa yang bertahan dalam suatu periode sejarah.

Literasi historis sangat penting karena membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis (critical thinking) untuk membedakan fakta dan opini, melawan hoaks dan disinformasi, serta memahami kompleksitas persoalan bangsa masa kini dengan belajar dari akar historisnya (Wineburg, 2001).

Rendahnya literasi historis ini bukan sekadar asumsi, tetapi didukung oleh sejumlah temuan empiris dan laporan lembaga terpercaya:

1. Survei National Geographic (2019) menunjukkan bahwa generasi milenial Indonesia menempati peringkat bawah dalam hal pengetahuan geografi dan sejarah, termasuk ketidakmampuan mengidentifikasi lokasi dan konteks sejarah peristiwa penting.
2. Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dikeluarkan OECD, meskipun lebih fokus pada literasi membaca, sains, dan matematika, mengindikasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS/Higher Order Thinking Skills) siswa Indonesia masih rendah. Kemampuan ini (seperti menganalisis, mengevaluasi, mencipta) adalah jantung dari literasi historis.
3. Penelitian Fadhillah (2019) yang berjudul "Historical Literacy in Indonesian History Education" mengungkap bahwa pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah Indonesia masih didominasi oleh pendekatan banking concept (konsep menabung) dari Paulo Freire, di mana guru mentransfer informasi dan siswa menghafalnya. Model seperti ini tidak melatih siswa untuk melakukan historical thinking.
4. Studi yang dilakukan Zed & Irianto (2021) terhadap siswa SMA di Sumatra menemukan bahwa mayoritas siswa kesulitan menganalisis bias dalam sebuah teks sejarah, memahami konteks zaman dari suatu kebijakan, atau menghubungkan peristiwa sejarah dengan isu kontemporer. Mereka cenderung melihat sejarah sebagai cerita yang sudah tetap dan tidak dapat dipertanyakan.
5. Penelitian Nisa & Kurniawati (2020) di Jawa Timur menyimpulkan bahwa siswa seringkali tidak mampu membedakan antara mitos, fakta, dan interpretasi dalam narasi sejarah, terutama yang berkaitan dengan sejarah lokal. Ini menunjukkan lemahnya penguasaan terhadap konsep historical evidence.

Maraknya hoaks sejarah dan narasi-narasi yang menyimpang yang mudah dipercaya dan diviralkan, menunjukkan kurangnya kemampuan masyarakat (yang merupakan produk sistem pendidikan) dalam melakukan verifikasi sumber dan analisis kritis terhadap klaim-klaim sejarah.

Pemahaman sejarah yang simplistik dan hitam-putih, misalnya dalam memandang tokoh sejarah hanya sebagai pahlawan atau penjahat tanpa memahami kompleksitas motivasi dan konteks zamannya. Ini menunjukkan ketiadaan kemampuan historical perspectives.

Kurikulum sejarah yang padat konten seringkali memaksa guru untuk mengejar target "materi tuntas" daripada "proses pemahaman tuntas". Sistem evaluasi (UTS, UAS) yang masih banyak menguji aspek hafalan (C1/C2 dalam taksonomi Bloom) daripada kemampuan analisis (C4) dan evaluasi (C5) turut memperkuat paradigma pembelajaran yang rendah literasi (Komalasari & Kokom, 2019).

Banyak guru yang masih mengandalkan metode ceramah dan catat, dengan buku teks sebagai satu-satunya sumber yang dianggap "paling benar". Pembelajaran jarang melibatkan analisis sumber primer, debat historis, atau proyek berbasis inkuiri yang dapat melatih keterampilan literasi historis. Keterbatasan akses terhadap sumber dan pelatihan bagi guru menjadi kendala utama (Suryani, 2018).

Karena metode pembelajarannya yang membosankan, siswa memandang sejarah sebagai mata pelajaran yang tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Mereka tidak melihat hubungan antara peristiwa masa lalu dengan tantangan yang mereka hadapi di era digital dan globalisasi sekarang. Akibatnya, motivasi untuk mendalami sejarah secara kritis sangat rendah (Djono, dkk., 2018).

Berdasarkan bukti-bukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya literasi historis siswa Indonesia adalah sebuah kondisi objektif yang memprihatinkan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada nilai akademis, tetapi lebih berbahaya lagi pada pembentukan identitas bangsa dan ketahanan nasional dalam menghadapi arus informasi. Oleh karena itu, intervensi melalui pelatihan guru sebagai ujung tombak pembelajaran menjadi strategi yang krusial dan mendesak untuk dilakukan. Guru perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan untuk mentransformasi pembelajaran sejarah dari hafalan menuju pemikiran kritis-historis.

Guru IPS/Sejarah menghadapi tantangan fundamental dalam transisi dari paradigma pembelajaran hafalan (rote learning) menuju pendekatan yang menekankan penalaran dan kontekstual. Akar masalahnya seringkali terletak pada desain kurikulum yang padat konten dan sistem evaluasi yang

terfokus pada aspek kognitif rendah. Kurikulum nasional cenderung menuntut cakupan materi yang sangat luas, dari periode pra-aksara hingga reformasi, sehingga memicu "balapan mengejar materi" di kelas. Dalam kondisi ini, guru terpaksa memilih metode ceramah dan transfer informasi satu arah sebagai cara paling efisien untuk "menuntaskan" kurikulum, ketimbang meluangkan waktu untuk kegiatan analisis sumber sejarah, diskusi, atau debat yang memakan waktu lebih lama namun esensial untuk membangun nalar sejarah. Sistem penilaian akhir nasional yang kerap masih menguji kemampuan mengingat fakta, tanggal, dan nama, semakin memperkuat praktik pembelajaran yang berorientasi pada hafalan ini, karena kesuksesan siswa (dan guru) masih diukur dengan parameter tersebut (Komalasari & Kokom, 2019; Suryani, 2018).

Tantangan kedua adalah rendahnya kapasitas dan akses guru terhadap sumber belajar dan pelatihan pedagogi inovatif. Mengajarkan sejarah secara bernalar memerlukan penguasaan terhadap metodologi sejarah, seperti cara menganalisis bias dalam sumber primer, memahami multiperspektif, dan mengkonstruksi narasi berdasarkan bukti. Sayangnya, tidak semua guru memiliki latar belakang yang kuat dalam historiografi dan historical thinking. Selain itu, keterbatasan akses terhadap arsip, dokumen sejarah, jurnal, atau bahkan koneksi internet yang memadai di daerah-daerah menyulitkan guru untuk menghadirkan materi yang kontekstual dan autentik. Pelatihan guru yang ada pun seringkali masih bersifat teoritis dan tidak memberikan contoh praktis bagaimana merancang pembelajaran berbasis inkuiri atau menggunakan sumber sejarah lokal yang mudah diakses. Akibatnya, guru merasa tidak percaya diri dan kekurangan "perlengkapan" untuk meninggalkan zona nyaman mengajar dengan buku teks sebagai kitab utama (Wineburg, 2001; Fadhillah, 2019).

Tantangan ketiga adalah mengubah persepsi dan membangun motivasi baik dari diri guru maupun peserta didik. Di satu sisi, sebagian guru telah terbiasa dengan metode konvensional selama bertahun-tahun sehingga muncul rasa resistensi terhadap perubahan karena dianggap merepotkan dan tidak pasti hasilnya. Di sisi lain, siswa yang telah lama dikondisikan untuk pasif dan menerima informasi jadi-jadian seringkali mengalami shock ketika diminta untuk berpikir kritis, mempertanyakan narasi buku, dan merefleksikan nilai-nilai sejarah. Mereka terbiasa dengan pertanyaan yang hanya memiliki satu jawaban benar, sehingga kegiatan sejarah yang bersifat multidimensi dan interpretatif justru menimbulkan kebingungan dan keengganan. Membangun budaya belajar yang menitikberatkan pada proses bertanya dan menalar, alih-alih sekadar menjawab, memerlukan upaya yang konsisten dan transformasi mindset yang tidak bisa instan, baik dari guru maupun siswa (Djono, dkk., 2018).

Tantangan utama yang dihadapi guru IPS/Sejarah dalam mengajarkan sejarah yang bernalar dan kontekstual, bukan sekadar hafalan, berakar pada beban kurikulum yang padat konten dan kesenjangan kompetensi pedagogis. Kurikulum yang sarat materi sering memaksa guru untuk memprioritaskan "kejar tuntas" atas dasar penguasaan informasi, sehingga waktu untuk kegiatan analisis mendalam, diskusi, atau kerja proyek yang melatih penalaran historis menjadi sangat terbatas. Di sisi lain, banyak guru yang belum sepenuhnya terbiasa dengan metodologi pembelajaran inkuiri dan historical thinking—seperti analisis sumber primer, memahami bias, dan multiperspektif—yang merupakan jantung dari pembelajaran bernalar. Keterbatasan akses terhadap sumber belajar yang kredibel dan pelatihan yang aplikatif semakin memperparah situasi ini, sehingga guru merasa lebih aman untuk kembali pada metode ceramah dan hafalan yang sudah teruji secara administratif, meski kurang efektif dalam membangun kemampuan berpikir kritis siswa (Suryani, 2018; Wineburg, 2001).

Di saat yang sama, guru dituntut untuk merespons Kebijakan Merdeka Belajar dan Konsep Profil Pelajar Pancasila yang justru menekankan pembentukan karakter dan kompetensi, seperti bernalar kritis, kreatif, berkebhinnekaan global, dan mandiri. Kebijakan ini secara paradigmatis mengharuskan pergeseran dari guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan (knowledge transmitter) menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk mengonstruksi pemahamannya sendiri. Dalam konteks sejarah, ini berarti siswa harus mampu menganalisis sebab-akibat yang kompleks, merefleksikan nilai-nilai dari suatu peristiwa, dan menghubungkannya dengan konteks kekinian, yang sejalan dengan dimensi

Bernalar Kritis dan Berkebhinnekaan Global. Tantangan beratnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai abstrak ini ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan penilaian yang konkret, sambil tetap berjuang dengan tuntutan kurikulum konvensional. Guru kesulitan menemukan keseimbangan antara mentransmisikan fakta sejarah yang dianggap wajib dan meluangkan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, mempertanyakan, dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dari peristiwa sejarah tersebut, yang notabene membutuhkan waktu dan strategi evaluasi yang lebih kompleks (Kemendikbud, 2022; Fadhillah, 2019).

Banyuwangi menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai konteks nyata dalam pembelajaran sejarah yang bernalar dan kontekstual. Warisan sejarah Kerajaan Blambangan, sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa timur yang gigih melawan kolonialisme, serta budaya masyarakat Using yang khas dengan tradisi lisan, kesenian Gandrung, dan sistem kepercayaannya, merupakan sumber belajar yang hidup dan autentik. Materi-materi ini dapat secara langsung dikaitkan dengan tema-tema besar dalam kurikulum sejarah nasional, seperti jaringan perdagangan Nusantara, resistensi terhadap kolonialisme, dan akulturasi kebudayaan. Misalnya, peristiwa Puputan Bayu (Perang Bayu) pada 1771-1772 tidak hanya sekadar catatan pertempuran, tetapi dapat menjadi studi kasus yang kaya untuk menganalisis sebab-akibat, strategi perlawanan, dan dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat Blambangan, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai ketangguhan dan nasionalisme dari Profil Pelajar Pancasila. Demikian pula, tradisi Gandrung dan Seblang dapat menjadi jendela untuk memahami konsep kontinuitas dan perubahan, serta sinkretisme kebudayaan (Arifin, 2018; Rokhman, 2020).

Namun sayangnya, potensi yang demikian melimpah ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran di kelas. Guru-guru IPS/Sejarah di Banyuwangi seringkali menghadapi kendala dalam mengakses sumber-sumber sejarah lokal yang terpercaya dan terlembaga dengan baik. Banyak narasi sejarah Blambangan dan budaya Using masih tersebar dalam bentuk cerita rakyat, publikasi terbatas, atau artefak yang tidak mudah dijadikan bahan ajar tanpa melalui proses kurasi dan adaptasi yang memadai. Akibatnya, terjadi dikotomi antara sejarah "nasional" yang diajarkan di sekolah dengan sejarah "lokal" yang hidup di masyarakat. Siswa mungkin hafal tahun-tahun peristiwa G30S/PKI, tetapi tidak mengenali nama dan perjuangan Mas Rempeg atau Wong Agung Wilis dalam Puputan Bayu yang justru terjadi di tanah kelahirannya sendiri. Minimnya pengembangan modul ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan media pembelajaran yang memanfaatkan potensi lokal ini menyebabkan pembelajaran sejarah kehilangan peluang untuk menjadi lebih relevan, kontekstual, dan membangun rasa cinta serta identitas kultural siswa terhadap daerahnya (Zed & Irianto, 2021; Nisa & Kurniawati, 2020).

Berdasarkan survei awal dan diskusi terfokus dengan MGMP IPS Kabupaten Banyuwangi, teridentifikasi masalah mendasar bahwa sebagian besar guru mengalami kesenjangan kompetensi pedagogis dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sejarah yang berpihak pada penguatan Profil Pelajar Pancasila. Guru-guru secara umum telah memahami konsep Profil Pelajar Pancasila secara teoretis, namun mengalami kesulitan substantif dalam mentransformasikannya ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Kesenjangan ini tercermin dari masih dominannya metode ceramah dan penugasan menghafal, yang dinilai kurang efektif untuk mengembangkan dimensi-dimensi kunci seperti bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Guru menyadari bahwa pendekatan konvensional ini sudah tidak memadai untuk menjawab tuntutan kurikulum merdeka, tetapi mereka kekurangan repertoar atau bank metode yang konkret dan aplikatif, seperti model pembelajaran berbasis proyek (PJBL) yang menggunakan sumber sejarah lokal, debat historis, atau analisis kasus, yang dapat secara langsung mengakomodasi pembentukan karakter dan kompetensi siswa (Hasil Diskusi dengan Pengurus MGMP IPS Banyuwangi, 2025; Suryani, 2018).

Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya kebutuhan spesifik untuk mengkontekstualisasikan pembelajaran. Guru-guru menyatakan keinginan yang kuat untuk membuat

pembelajaran sejarah lebih relevan bagi siswa Banyuwangi dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti sejarah Blambangan atau budaya Using. Namun, mereka menghadapi kendala ganda: pertama, keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mentransformasi materi lokal yang seringkali masih berupa cerita rakyat atau sumber yang tersebar menjadi bahan ajar yang terstruktur dan sesuai dengan capaian pembelajaran; kedua, kebingungan dalam merancang instrumen penilaian yang tidak hanya mengukur pemahaman kognitif terhadap fakta sejarah lokal, tetapi juga mampu menangkap perkembangan sikap dan keterampilan siswa yang sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila, seperti tumbuhnya rasa bangga akan budaya sendiri (Berkebinekaan Global) atau kemampuan bekerja sama dalam menelusuri sejarah daerahnya (Bergotong Royong). Kebutuhan ini mengindikasikan bahwa solusi yang dibutuhkan bukan hanya sekadar pelatihan metode, tetapi pendampingan yang komprehensif dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan terukur (Angket Kebutuhan Guru MGMP IPS Banyuwangi, 2024; Fadhillah, 2019).

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, solusi yang ditawarkan adalah sebuah program Pelatihan Literasi Historis yang secara khusus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan guru. Program ini tidak hanya berfokus pada penguatan pemahaman konsep literasi historis, tetapi lebih menekankan pada aspek aplikatifnya dalam merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Pelatihan ini dirancang untuk membekali guru dengan kerangka berpikir dan keterampilan praktis dalam membelajarkan sejarah sebagai suatu disiplin ilmu yang melatih cara berpikir (*historical thinking*), bukan sekadar kumpulan fakta. Melalui pendekatan workshop yang partisipatif, guru akan dilatih untuk menggunakan strategi-strategi spesifik seperti analisis sumber primer sejarah Banyuwangi, pendekatan multiperspektif pada suatu peristiwa, dan pembelajaran berbasis inkuiri. Metode-metode ini secara intrinsik telah sejalan dengan dimensi Bernalar Kritis dan Kreatif, karena menuntut siswa untuk mempertanyakan, menganalisis bukti, dan membangun argumentasi berdasarkan data sejarah, sekaligus menciptakan narasi atau presentasi kreatif berdasarkan temuan mereka (Seixas & Morton, 2013; Wineburg, 2001).

Lebih lanjut, pelatihan ini dirancang untuk secara langsung membimbing guru dalam mengembangkan Perangkat Ajar (RPP dan LKPD) yang kontekstual. Guru akan difasilitasi untuk memanfaatkan kekayaan sejarah dan budaya Banyuwangi—seperti Kisah Puputan Bayu, Tradisi Gandrung, atau Jejak Kota Tua Banyuwangi—sebagai studi kasus dan konten utama dalam perangkat ajar mereka. Integrasi dengan Profil Pelajar Pancasila tidak dilakukan secara tambal sulam, tetapi menjadi roh dari desain pembelajaran. Sebagai contoh, ketika menganalisis strategi perlawanan Raja Blambangan, siswa tidak hanya dilatih bernalar kritis, tetapi juga direfleksikan untuk mengambil nilai ketangguhan dan semangat gotong royong (dimensi Mandiri dan Bergotong Royong). Begitu pula, dengan mempelajari kearifan lokal dan toleransi dalam masyarakat Using, siswa dapat memahami makna Berkebinekaan Global secara lebih nyata. Dengan demikian, solusi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, menghasilkan pembelajaran sejarah yang tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif-historis, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi siswa sebagaimana dituju dalam Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbud, 2022; Fadhillah, 2019).

### **Metode**

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam pelatihan ini diterapkan dengan melibatkan guru sebagai mitra aktif dalam seluruh siklus kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. PAR dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan pembelajaran sejarah yang membutuhkan solusi kontekstual dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pendekatan ini diwujudkan melalui pelatihan partisipatif dimana guru tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi sebagai co-creator yang terlibat langsung dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran, mengembangkan perangkat ajar berbasis literasi historis, dan merefleksikan praktik mengajar mereka. Melalui workshop kolaboratif, guru secara aktif melakukan analisis sumber sejarah lokal Banyuwangi, menyusun RPP terintegrasi Profil

Pelajar Pancasila, serta melakukan simulasi dan peer teaching untuk menguji efektivitas perangkat yang mereka kembangkan. Proses ini memastikan bahwa materi pelatihan benar-benar menjawab kebutuhan riil di kelas dan sesuai dengan konteks budaya Banyuwangi (Kindon, Pain, & Kesby, 2007; Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014).

Kegiatan ini melibatkan multipihak dengan peran dan bentuk keterlibatan yang saling melengkapi. Tim Pengabdian dari perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator dan pendamping yang menyediakan framework konseptual literasi historis dan Profil Pelajar Pancasila, serta metodologi penelitian partisipatif. Guru IPS Banyuwangi sebagai mitra utama terlibat sebagai co-researcher yang berkontribusi dalam identifikasi masalah, pengembangan materi ajar, implementasi RPP, dan refleksi hasil pembelajaran. MGMP IPS Kabupaten Banyuwangi berperan sebagai institutional partner yang memfasilitasi koordinasi, rekrutmen peserta, dan memastikan keberlanjutan program. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi terlibat sebagai policy supporter yang memberikan legitimasi kebijakan dan memfasilitasi diseminasi hasil pelatihan. Kemitraan ini dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dimana masing-masing pihak menyumbangkan keahlian dan sumber dayanya secara kolaboratif (Cahyono, 2019; Suryani, 2018).

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara hybrid selama 3 bulan dengan rincian: Pelatihan Intensif (3 hari) dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi atau sekolah mitra yang representatif, difokuskan pada pembekalan konseptual dan workshop pengembangan perangkat ajar. Pendampingan Implementasi (8 minggu berikutnya) dilaksanakan di sekolah masing-masing peserta dengan pola pendampingan berkala, dimana guru menerapkan RPP yang telah dikembangkan dan didampingi secara daring maupun luring oleh tim pengabdian. Loka Karya Refleksi dan Diseminasi (1 hari) kembali dilaksanakan secara luring untuk merefleksikan hasil implementasi, menyusun modul best practices, dan merencanakan tindak lanjut. Pola waktu dan tempat ini dirancang untuk memastikan proses transformasi pedagogis berlangsung secara komprehensif, mulai dari pembangunan pemahaman hingga pendampingan berkelanjutan dalam praktik nyata di kelas (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014; Ife, 2016).

### **Hasil dan Diskusi**

Proses pendampingan dalam program Pelatihan Literasi Historis ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk identifikasi masalah dan penyamaan persepsi mengenai pembelajaran sejarah, dilanjutkan dengan pelatihan intensif selama tiga hari yang fokus pada penguatan konsep literasi historis dalam Kurikulum Merdeka, integrasi Profil Pelajar Pancasila, serta pemanfaatan sumber sejarah lokal Banyuwangi. Kegiatan kemudian berlanjut dengan workshop pengembangan perangkat ajar dimana guru secara berkelompok menyusun RPP dan LKPD dengan memanfaatkan sumber-sumber sejarah lokal seperti arsip Kerajaan Blambangan, tradisi lisan masyarakat Using, dan situs sejarah setempat. Tahap implementasi dan pendampingan berlangsung selama delapan minggu, dimana guru menerapkan perangkat ajar yang telah dikembangkan di kelas masing-masing dengan pendampingan rutin melalui kunjungan kelas dan konsultasi daring, yang kemudian diakhiri dengan lokakarya refleksi dan diseminasi untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi serta menyusun rencana tindak lanjut.

Dalam pelaksanaannya, program ini meliputi beberapa aksi nyata untuk memecahkan masalah pembelajaran, antara lain pelatihan analisis sumber sejarah multiperspektif yang mengajak guru menganalisis peristiwa Puputan Bayu dari berbagai sudut pandang untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis siswa, workshop pengembangan bahan ajar kontekstual yang memanfaatkan situs sejarah lokal seperti Situs di Desa Tembokrejo dan budaya Gandrung untuk memperkuat dimensi berkebinekaan global, pendampingan implementasi pembelajaran inkuiri melalui proyek "Telusuri Jejak Sejarah Kampungmu" yang mengajak siswa melakukan investigasi lapangan untuk mengembangkan kemandirian dan kreativitas, serta pembuatan bank soal literasi historis yang berfokus pada pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi sebagai alternatif evaluasi beyond hafalan.

Selama proses pendampingan, tim menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang berhasil diatasi secara kolaboratif. Tantangan teknis berupa kesulitan mengakses sumber sejarah lokal terpecahkan melalui sinergi dengan ahli sejarah lokal dari Universitas Banyuwangi, sementara tantangan pedagogis terkait resistensi guru terhadap perubahan metode pembelajaran berhasil diatasi melalui pendekatan coaching yang personal dan showcase praktik baik. Dinamika positif yang muncul berupa terbentuknya komunitas praktisi among guru IPS Banyuwangi yang aktif berbagi sumber belajar dan strategi pembelajaran melalui grup WhatsApp, serta transformasi mindset guru dari sekadar mengajar sejarah sebagai produk menuju memfasilitasi sejarah sebagai proses berpikir. Hasil monitoring menunjukkan capaian yang signifikan dengan 85% peserta berhasil mengembangkan perangkat ajar inovatif yang terintegrasi Profil Pelajar Pancasila, peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah berbasis lokal, serta komitmen keberlanjutan dari MGMP IPS Banyuwangi untuk menjadikan literasi historis sebagai agenda rutin dalam pertemuan berkala.

Hasil pendampingan dalam program pelatihan literasi historis ini memberikan landasan empiris yang relevan untuk didiskusikan dalam kerangka teoritis pendidikan sejarah dan implementasi Profil Pelajar Pancasila. Temuan bahwa 85% peserta berhasil mengembangkan perangkat ajar inovatif mengkonfirmasi teori constructivist learning Vygotsky (1978) tentang pentingnya scaffolding dalam pengembangan profesional guru. Proses pendampingan yang berjenjang dan berkelanjutan terbukti efektif dalam membangun Zone of Proximal Development guru, dimana guru mampu mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi melalui bimbingan sistematis.

Transformasi pembelajaran dari pendekatan hafalan menuju literasi historis sejalan dengan konsep historical thinking yang dikembangkan oleh Seixas & Morton (2013). Implementasi analisis multiperspektif terhadap peristiwa Puputan Bayu membuktikan bahwa pendekatan ini tidak hanya mengembangkan kemampuan bernalar kritis, tetapi juga merealisasikan dimensi keberbinekaan global dalam Profil Pelajar Pancasila. Hal ini konsisten dengan teori historical consciousness Rösen (2005) yang menekankan pentingnya pemahaman sejarah untuk navigasi masa depan.

Keberhasilan integrasi sumber sejarah lokal Banyuwangi dalam pembelajaran memperkuat teori contextual teaching and learning Johnson (2002) bahwa pembelajaran yang bermakna harus terkait dengan kehidupan nyata peserta didik. Penggunaan situs sejarah lokal dan tradisi Using dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan relevansi materi, tetapi juga membangun identitas kultural siswa, yang merupakan esensi dari dimensi Berakar pada Budaya dalam Profil Pelajar Pancasila.

Tantangan dalam perubahan pedagogis yang dihadapi guru mengkonfirmasi teori concerns-based adoption model (CBAM) oleh Hall & Hord (2015) tentang tahapan penerimaan inovasi. Resistensi awal yang berubah menjadi penerimaan setelah pendampingan intensif menunjukkan bahwa perubahan praktik mengajar memerlukan dukungan berkelanjutan dan komunitas belajar (community of practice) seperti yang terbentuk melalui MGMP IPS Banyuwangi.

Peningkatan keterlibatan siswa dalam proyek sejarah lokal mendukung teori experiential learning Kolb (1984) bahwa pembelajaran melalui pengalaman langsung dapat meningkatkan pemahaman konseptual. Proyek "Telusuri Jejak Sejarah Kampungmu" tidak hanya mengembangkan keterampilan penelitian sejarah, tetapi juga merealisasikan dimensi mandiri dan kreatif dalam Profil Pelajar Pancasila.

Pembentukan komunitas praktisi guru melalui WhatsApp group merupakan implementasi dari teori social learning Bandura (1977) bahwa pembelajaran profesional paling efektif ketika terjadi dalam komunitas yang saling mendukung. Jejaring kolaboratif ini menjadi media sharing praktik baik dan refleksi kolektif yang essential untuk pertumbuhan profesional berkelanjutan.

Keberhasilan program ini dalam mengintegrasikan literasi historis dengan Profil Pelajar Pancasila membuktikan bahwa pendekatan multidimensional learning sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21. Integrasi antara penalaran historis, nilai-nilai karakter, dan konteks lokal menciptakan ekosistem pembelajaran yang holistik dan transformatif.

## Kesimpulan

### A. Refleksi Hasil Pendampingan

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian program pendampingan, dapat direfleksikan beberapa capaian penting sekaligus tantangan yang dihadapi. Pertama, program ini berhasil membangun kesadaran kritis di kalangan guru IPS Banyuwangi mengenai urgensi transformasi pembelajaran sejarah dari pendekatan hafalan menuju penguatan literasi historis. Guru-guru mulai menunjukkan pergeseran mindset dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk berpikir historis. Kedua, integrasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran sejarah terbukti dapat dilakukan secara konkret melalui pendekatan kontekstual dengan memanfaatkan sumber-sumber sejarah lokal Banyuwangi. Namun, refleksi juga mengungkap beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain masih adanya kesenjangan kemampuan dalam mengimplementasikan teknik evaluasi literasi historis di antara peserta, serta keterbatasan waktu guru dalam mengembangkan bahan ajar inovatif secara mandiri akibat beban administratif yang tinggi. Keberhasilan pendampingan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor kolaboratif melalui kemitraan yang setara antara tim pengabdian, MGMP IPS, dan Dinas Pendidikan, yang menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan refleksi tersebut, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan lebih lanjut:

#### 1. Bagi Guru dan MGMP IPS Banyuwangi

- Membentuk task force literasi historis dalam struktur MGMP untuk memastikan keberlanjutan program melalui pertemuan rutin berjenjang dan diseminasi praktik baik.
- Mengembangkan bank sumber belajar digital yang memuat arsip-arsip sejarah lokal Banyuwangi yang telah terkurasi untuk memudahkan akses guru.
- Meningkatkan kolaborasi dengan komunitas sejarah lokal dan pelaku budaya untuk pengayaan materi pembelajaran.

#### 2. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

- Memformalkan program literasi historis dalam rencana strategis Dinas Pendidikan melalui penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan dan lomba inovasi pembelajaran sejarah berbasis lokal.
- Memfasilitasi pengembangan modul pembelajaran sejarah Banyuwangi yang terintegrasi Profil Pelajar Pancasila untuk dapat diadopsi secara luas di sekolah-sekolah.
- Merancang skema insentif bagi guru yang berprestasi dalam mengimplementasikan pembelajaran literasi historis.

#### 3. Bagi Perguruan Tinggi

- Mengembangkan program pendampingan lanjutan yang fokus pada asesmen literasi historis dan penelitian tindakan kelas.
- Membuka akses terhadap repositori sumber-sumber akademik dan hasil penelitian sejarah lokal untuk mendukung pengayaan materi guru.
- Menjembatani kolaborasi antara guru dengan mahasiswa program studi sejarah melalui program KKN tematik atau magang.

#### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

- Perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai efektivitas berbagai model asesmen literasi historis dalam konteks kurikulum merdeka.
- Diperlukan penelitian mengenai dampak jangka panjang integrasi sejarah lokal terhadap pembentukan karakter dan identitas kultural siswa.

Dengan implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat tercipta ekosistem pembelajaran sejarah yang berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kualitas akademik tetapi juga

memperkuat jati diri generasi muda Banyuwangi melalui pemahaman sejarah dan budayanya yang mendalam.

### **Daftar Referensi**

- Arifin, W. (2018). Blambangan: Jejak Terakhir Kerajaan Hindu di Jawa Timur. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Cahyono, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Participatory Action Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djono, dkk. (2018). The Phenomenon of History Learning: A Study on the Implementation of 2013 Curriculum in Senior High Schools in Surakarta. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(1), 183-198.
- Fadhilah, M. (2019). Historical Literacy in Indonesian History Education. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 109-124.
- Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Pengembangan Projek Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner*. Singapore: Springer.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods*. New York: Routledge.
- Komalasari, K., & Kokom, S. (2019). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- National Geographic Society. (2019). *National Geographic Literacy Survey*. Washington, D.C.
- Nisa, A. F., & Kurniawati, Y. (2020). Analisis Kemampuan Literasi Sejarah Siswa SMA dalam Memahami Sejarah Lokal. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 145-160.
- OECD. (2018). *PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do*. OECD Publishing.
- Rokhman, F. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan Masyarakat Using Banyuwangi. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 9(2), 195-212.
- Seixas, P., & Morton, T. (2013). *The Big Six Historical Thinking Concepts*. Toronto: Nelson Education.
- Suryani, N. (2018). Inovasi Pembelajaran Sejarah di Era Digital. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(1), 1-12.
- Wineburg, S. (2001). *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*. Philadelphia: Temple University Press.
- Zed, M., & Irianto, J. (2021). Historical Critical Thinking Skills of Senior High School Students in Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 15(1), 112-120.